

Pelestarian Benteng Van der Capellen Kabupaten Tanah Datar 2007-2010

Bunga Suci Mawaddah^{1*}, Erniwati²

^{1,2} Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

* bungamawaddah25@gmail.com

ABSTRACT

Fort Van der Capellen, a colonial Dutch heritage site located in Batusangkar City, Tanah Datar Regency, has a long history marked by various functional transformations, including serving as a colonial defense post, Japanese military headquarters, a Teacher Training College (now State University of Padang), and later the Tanah Datar Police Resort office. Since ceasing its official function in 2000, the building fell into neglect and deterioration due to aging and insufficient maintenance. This article examines the preservation efforts carried out by the government through the Batusangkar Cultural Preservation Center between 2007 and 2010, employing the historical method through heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The findings reveal that the preservation process occurred in three stages: first, protection through environmental cleaning in 2007 and phased physical restoration from 2008 to 2010; second, development involving documentation, technical studies, and expert involvement to ensure a planned conservation process; and third, utilization, including the fort's adaptive reuse as the Office of Tourism, Youth, and Sports of Tanah Datar Regency and its designation as a National Cultural Heritage site.

Keywords: *Fort Van der Capellen, Preservation, Cultural Heritage, Batusangkar, Tanah Datar Regency*

ABSTRAK

Benteng Van der Capellen merupakan peninggalan kolonial Belanda yang terletak di Kota Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar. Benteng ini memiliki sejarah panjang serta mengalami perubahan fungsi, mulai dari kubu pertahanan kolonial, markas militer Jepang, Perguruan Tinggi Pendidikan Guru yang kini Universitas Negeri Padang, hingga menjadi kantor Kepolisian Resor Tanah Datar. Sejak tidak lagi difungsikan pada tahun 2000, bangunan ini terbengkalai dan mengalami kerusakan akibat usia bangunan dan kurangnya perawatan. Artikel ini bertujuan menjelaskan bagaimana upaya pelestarian yang dilakukan oleh pemerintah melalui Balai Pelestarian Kebudayaan Batusangkar terhadap Benteng Van der Capellen pada periode 2007-2010. Metode yang digunakan adalah metode sejarah melalui empat tahapan, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelestarian Benteng Van der Capellen pada tahun 2007-2010 dilaksanakan dalam tiga tahapan. Pertama, tahap perlindungan berupa pembersihan lingkungan benteng pada tahun 2007 serta pemugaran fisik bangunan yang dilakukan secara bertahap dari tahun 2008 sampai 2010. Kedua, tahap pengembangan yang meliputi kegiatan dokumentasi, studi teknis, serta pelibatan tenaga ahli untuk mendukung proses pelestarian secara terencana. Ketiga, tahap pemanfaatan, melalui alih fungsi benteng sebagai Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar sekaligus penetapannya sebagai Cagar Budaya Nasional.

Kata Kunci: *Benteng Van der Capellen, Pelestarian, Cagar Budaya, Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar*

PENDAHULUAN

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki kekayaan warisan budaya dan sejarah, salah satunya adalah Benteng Van der Capellen yang terletak di Kota Batusangkar. Benteng Van der Capellen merupakan bangunan bersejarah pada masa kolonial Belanda yang masih berdiri kokoh hingga saat ini yang memiliki arti penting sebagai benda cagar budaya (Yusuf, 2008). Benteng ini didirikan pada tahun 1822 diatas dataran yang cukup tinggi (Najmi, 2023).

Pembangunan benteng ini tidak dapat dipisahkan dari konflik antara Kaum Adat dan Kaum Agama (Kaum Paderi) yang dipicu oleh gerakan pemurnian Islam yang dipelopori oleh tiga orang haji yang baru kembali dari Mekkah sekitar awal abad ke-19 (Najmi, 2023). Dibawah pimpinan Kolonel Raff pasukan Belanda kemudian masuk ke daerah Tanah Datar untuk menumpas Gerakan Kaum Agama. (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2012). Nama benteng diambil dari nama Gubenur Jenderal Belanda Godert Alexander Gerard Philip Baron Van der Capellen (Najmi, 2023). Pembangunan Benteng Van der Capellen bertujuan sebagai kubu pertahanan para tentara kolonial Belanda dari serangan Kaum Paderi dan sebagai tempat barak tentara kolonial dalam mempersiapkan perang dengan Kaum Paderi. Seiring berjalannya waktu benteng dijadikan sebagai Ibukota atau Pusat wilayah administratif Belanda (Najmi, 2019).

Gambar 1. Benteng Van der Capellen Pada Masa Kolonial



Sumber : KITLV diakses pada tanggal 25 Mei 2025

Pada tanggal 25 Mei 1960, Benteng Van der Capellen diserahkan kepada Polri Tanah Datar sebagai Markas Komando Resor Kepolisian hingga Tahun 2000. Setelah Benteng Van der Capellen tidak difungsikan sebagai kantor Polres Tanah Datar, kondisi Benteng bangunan mengalami kerusakan secara keseluruhan, pelapukan, dan banyak komponen bahan yang hilang, seperti atap seng, kaca jendela, dan kaca pintu, serta kondisi lingkungan yang semak ditumbuhi rumput-rumput liar (Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Batusangkar Wilayah Kerja Provinsi Sumatera Barat, 2009).

Pelaksanaan pelestarian Benteng Van der Capellen mulai dilakukan setelah diterbitnya Peraturan Menteri kebudayaan dan Pariwisata Nomor OM.37/OT.001/MKP/2006 tanggal 7 September 2006. Regulasi ini memberikan dasar hukum bagi Balai Pelestarian Kebudayaan Batusangkar untuk melaksanakan fungsinya di wilayah kerjanya. Sejak saat itu, Balai Pelestarian Kebudayaan Batusangkar memiliki kewenangan langsung untuk menyusun dan melaksanakan program pelestarian oleh pemerintah pusat sebagai bentuk kepedulian kepada bangunan bersejarah, yang diawali dengan kegiatan pembersihkan benteng pada tahun 2007 (Azaria, 2014).

Melalui Balai Pelestarian Kebudayaan Batusangkar, pelestarian Benteng Van der Capellen dilaksanakan secara bertahap, meliputi perlindungan melalui kegiatan pemugaran, pengembangan melalui studi teknis dan dokumentasi, serta pemanfaatan melalui alih fungsi sebagai Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar (Undang-Undang, 2010). Pelestarian ini sejalan dengan semangat menjaga warisan budaya nasional dari kerusakan dan keterlupaan.

Permasalahan utama yang menjadi fokus dalam artikel ini adalah bagaimana bentuk pelestarian yang dilakukan pemerintah setelah bangunan Benteng Van der Capellen terbengkalai pasca tidak lagi digunakan sebagai kantor Polres sejak tahun 2000. Masalah ini muncul akibat hilangnya fungsi bangunan, tidak adanya perawatan rutin, serta belum adanya upaya pelestarian yang menyeluruh hingga awal dekade 2000-an. Penelitian tentang pelestarian bangunan bersejarah sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti penelitian yang dilakukan Atikah Rahmadini Maiman yang membahas upaya yang dilakukan pemerintah kota padang dalam melestarikan Gedung cagar budaya yang berjudul “Pelestarian Bangunan Gedung Cagar Budaya di Kawasan Kota Lama Oleh Pemerintah Kota Padang”(Maiman et al., 2021), lalu penelitian dari Wahyu Prabowo dan Abito Bamban Yuwono yang berjudul “Kajian Pelestarian dan Pemeliharaan Bangunan Cagar Budaya di Surakarta” (Prabowo Y & Yuwono B, 2021) dan penelitian Arki Auli Hadi yang berjudul “Pelestarian Cagar Budaya di Batusangkar” (Hadi & Nofra, 2022).

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang secara khusus membahas pelestarian Benteng Van der Capellen setelah bangunan ini terbengkalai sejak tahun 2000. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pelestarian dilakukan oleh pemerintah melalui Balai Pelestarian Kebudayaan Batusangkar pada periode 2007–2010 guna menjaga keberadaan dan nilai sejarah benteng tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan studi sejarah dan pelestarian budaya, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan masyarakat dalam merancang upaya pelestarian bangunan cagar budaya di masa depan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari 4 tahapan yaitu. Heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Gottschalk & Notosusanto, 1975). Heuristik yang merupakan kegiatan awal mencari dan mengumpulkan sumber yang

berkaitan dengan topik yang dibahas. Sumber-sumber sejarah terbagi atas dua yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer yang akan digunakan yaitu dokumen Pemerintah Laporan Pemugaran Benteng van der Capellen Tahap I, II, dan III, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, dan foto Benteng Van der Capellen, sedangkan Sumber sekunder yang digunakan yaitu buku-buku yang relevan seperti buku yang ditulis Najmi tentang sejarah kota Batusangkar yang membahas tentang pertumbuhan kota Batusangkar, selanjutnya buku dari Departemen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Skripsi yang membahas tentang Pelestarian Cagar Budaya (Herlina, 2020).

Setelah mendapatkan sumber, dilakukan kegiatan kritik sumber untuk pengujian kebenaran sumber sejarah. Kritik Sumber terdiri dari kritik ekstren dan intern. Kritik eksternal merupakan untuk menyelidiki atau meneliti keaslian sumber, bagaimana otensitasnya suatu sumber, dan apakah sumber tersebut masih asli atau tidak. Sedangkan kritik internal merupakan melakukan pengujian kandungan informasi yang diperoleh dari sumber (Kuntowijoyo, 2005). Selanjutnya Interpretasi, yaitu proses penafsiran terhadap informasi atau data yang telah dikumpulkan sebelumnya agar dapat dirangkai menjadi fakta sejarah (Heryati, 2004). Dan yang terakhir, Historiografi merupakan penulisan sejarah dilakukan secara perpaduan yang sistematis antara satu sumber dengan sumber yang lain (Heryati, 2004).

PEMBAHASAN

Upaya Pelestarian Benteng Van der Capellen 2007-2010

Perlindungan dan Pengembangan Benteng Van der Capellen

Setelah Polres Tanah Datar secara resmi dipindahkan ke gedung baru di kawasan Pagaruyung pada tanggal 26 April 2001, fungsi Benteng Van der Capellen sebagai institusi negara mengalami kekosongan. Selama lebih dari empat dekade, benteng ini menjadi pusat aktivitas kepolisian dan kantor resmi pemerintah pusat dalam bidang penegakan hukum. Namun, pemindahan tersebut justru menandai dimulainya fase keterbengkalaiannya sebagai bangunan bersejarah (Aan, 2024).

Dalam kajian pelestarian bangunan bersejarah, terdapat istilah *dead monument* yang merujuk pada bangunan cagar budaya yang tidak lagi digunakan atau dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Bangunan seperti ini hanya menjadi peninggalan sejarah tanpa fungsi yang hidup di masyarakat. Karena tidak digunakan, bangunan cenderung dibiarkan, tidak dirawat, dan perlahan mengalami kerusakan baik secara fisik maupun struktur (Salain, 2012). Fenomena ini juga terjadi pada Benteng Van der Capellen. Sejak tidak lagi difungsikan sebagai markas kepolisian, bangunan dibiarkan kosong. Berbagai kerusakan mulai tampak, seperti pelapukan material kayu, hilangnya atap seng, kaca jendela dan pintu yang pecah, serta lingkungan benteng yang dipenuhi semak belukar.

Kesadaran terhadap pentingnya pelestarian bangunan bersejarah oleh pemerintah melalui inisiatif pemerintah pusat, melalui Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Pada tanggal 7 September 2006, diterbitkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.37/OT.001/MKP-2006 tentang organisasi dan tata kerja Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala. Merespon peraturan yang diterbitkan, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala memiliki wewenang untuk menjalankan fungsi pelestarian di wilayah Sumatera Barat dan Riau (Yusuf, 2008). Pada tanggal 11 hingga 16 Agustus 2007, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Batusangkar melaksanakan kegiatan awal berupa pembersihan lingkungan sekitar Benteng Van der Capellen.

Gambar 2. Kondisi Benteng Van der Capellen Tahun 2005



Sumber : Balai Pelestarian Kebudayaan Batusangkar

a) Pembersihan Lingkungan Benteng Van der Capellen 2007

Pada tanggal 11 hingga 16 Agustus 2007, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Batusangkar melaksanakan kegiatan awal berupa pembersihan lingkungan sekitar Benteng Van der Capellen (Yusuf, 2007). Upaya pembersihan ini menjadi langkah awal penyelamatan sebelum dilakukan tindakan lebih lanjut. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini melibatkan lima orang petugas dari BP3 Batusangkar, yakni M. Yusuf (Staf Pokja Pemeliharaan), Bambang Hermanto (Staf Umum), Legimin (Staf Umum), Hafnizon (Staf Umum), dan Slamet (Staf Umum) (Yusuf, 2007).

Tidak adanya program pelestarian yang berkesinambungan menyebabkan benteng ini ditumbuhi semak belukar dan tanaman liar. Sebagai respons terhadap kondisi yang memprihatinkan, dilakukan upaya awal pembersihan lingkungan benteng untuk mengembalikan bentuk arsitektural. Kegiatan pembersihan dimulai dengan pemangkasan rumput, pencabutan tanaman semak, dan penebangan pohon liar di sekitar benteng. Pembersihan juga mencakup bagian dalam ruangan, dimana debu dan kotoran telah menutupi elemen-elemen penting. Setelah pembersihan selesai, dilakukan dokumentasi visual untuk merekam kondisi benteng. Dalam pelaksanaan pembersihan lingkungan benteng, masih ada beberapa bagian yang belum dibersihkan karena terhalang pagar kawat

berduri dan memerlukan sistem perawatan yang terorganisir dan berkelanjutan, agar nilai historisnya tidak menurun (Yusuf, 2007).

Gambar 3. Kondisi benteng setelah dibersihkan 2007



Sumber : Laporan pembersihan lingkungan Benteng Van der Capellen

b) Pemugaran Tahap I Tahun 2008

Setelah dilaksanakan pembersihan lingkungan Benteng Van der Capellen pada tahun 2007, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala mengalokasikan anggaran khusus kepada Balai Pelestarian Peninggalan Sejarah Batusangkar melalui DIPA Nomor 0085.0/040-04.0/III/2008 tertanggal 31 Desember 2007. Alokasi anggaran ini menjadi dasar dimulainya tahap awal pelestarian fisik bangunan berupa pemugaran (Yusuf, 2008).

Pada pertengahan April tahun 2008, upaya pelestarian warisan kolonial dilakukan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Batusangkar. Dalam kurun waktu antara tanggal 17 hingga 20 April 2008, sekelompok petugas teknis terdiri dari M. Yusuf selaku Staf Pokja Pemugaran dan Yusril dari Pokja Pemeliharaan yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan data terhadap bangunan bersejarah Benteng Van der Capellen. Adapun pada bagian bangunan belakang, tim pelestarian menyarankan pembongkaran pada struktur lantai atas yang dibangun pada masa fungsi baru benteng sebagai kantor, karena bangunan tambahan tersebut tidak sesuai dengan karakter asli benteng serta berpotensi membahayakan stabilitas struktur utama. Dalam tahap pelaksanaan yang dilakukan oleh Tim Pokja dan pekerja lain yang memang ahli, pelaksanaan tahap awal pemugaran, yaitu pembongkaran elemen-elemen non-otentik. Ini termasuk pembongkaran dinding bata pada bangunan tambahan di sisi kiri, kanan, dan belakang, serta pada bagian WC dan dinding depan benteng. Tidak hanya itu, sistem saluran air hujan, piring-piring, hingga atap seng yang telah rusak turut dibongkar (Yusuf, 2008).

Proses selanjutnya adalah pemulihan elemen otentik. Pemasangan kembali dilakukan berdasarkan hasil dokumentasi sejarah dan pengamatan arkeologis. Beberapa komponen yang direstorasi mencakup balok kuda-kuda, tiang teras, dinding bata pada bekas sel tahanan, serta plat beton untuk atap. Pemugaran juga memperhatikan elemen arsitektural kecil seperti

kozen pintu, engsel, ventilasi besi, dan kaca jendela, demi menjaga keaslian visual dan nilai historis bangunan kolonial tersebut (Yusuf, 2008).

Gambar 3. Kondisi Benteng Van der Capellen Setelah di Pugar 2008



Sumber : Laporan Kerangka Kerja Acuan Benteng Van der Capellen 2008

c) Pemugaran Tahap II Tahun 2009

Memasuki tahun kedua pelaksanaan program pelestarian terhadap Benteng Van der Capellen, pemerintah melalui Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Batusangkar Kembali melanjutkan kegiatan pemugaran sebagai bagian dari upaya merawat warisan kolonial. Berdasarkan DIPA BP3 Batusangkar Wilayah Kerja Provinsi Sumatera Barat dan Riau Nomor 0085.0/040-04.0/III/2009 tanggal 31 Desember 2008, kegiatan ini dilaksanakan selama lima bulan, sejak bulan Juni hingga Oktober 2009 (Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Batusangkar Wilayah Kerja Provinsi Sumatera Barat, 2009).

Pelaksanaan tahap kedua dipimpin oleh A. Tri Mulyono, S.H dan melibatkan Tim Pemugaran I bersama sejumlah tukang yang ahli. Tujuan pelestarian pada pekerjaan tahap II yaitu mempertahankan bagian-bagian asli bangunan kanan yang masih memungkinkan untuk dipertahankan bagian-bagian asli bangunan yang masih bisa dipertahankan. Pemerintah melalui Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Batusangkar melaksanakan pemugaran Tahap II selama lima bulan, terhitung sejak Juni hingga Oktober 2009. Pelaksanaan ini menggunakan sistem pemugaran sebagian, yakni hanya mengganti elemen bangunan yang mengalami kerusakan berat dan tidak lagi layak secara material. Sementara itu, bahan-bahan asli yang masih dapat dipertahankan tetap digunakan guna menjaga keaslian material dan nilai historis benteng (Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Batusangkar Wilayah Kerja Provinsi Sumatera Barat, 2009)

Proses pemugaran dilakukan secara bertahap. *Tahap pertama* mencakup pekerjaan awal berupa pembongkaran atap seng, rangka atap, serta pemasangan kembali struktur rangka dan perabung atap. Pekerjaan ini menjadi pondasi teknis penting dalam menata ulang bagian atas

bangunan yang sudah rusak berat. *Pada tahap kedua*, difokuskan pada bagian interior benteng, terutama loteng dan struktur langit-langit. Pekerjaan meliputi pembongkaran loteng papan, pemasangan balok baru, serta penggantian kozen pintu dan jendela. Seluruh elemen yang diganti tetap merujuk pada bentuk dan bahan aslinya, sesuai prinsip konservasi. *Tahap ketiga* melanjutkan pekerjaan sebelumnya, yaitu pengecatan ulang loteng, balok, dan kozen pintu- jendela, menandai tahap awal pemulihan visual bangunan agar mendekati kondisi aslinya. *Tahap keempat* mencakup bagian eksterior benteng, di antaranya penggantian tiang teras, reng balok, serta pengecatan seluruh elemen struktural luar seperti dinding tembok dan jendela. Penambahan kaca jendela yang sesuai bentuk aslinya menjadi simbol kembalinya estetika kolonial benteng. Sebagai penutup, *tahap kelima* difokuskan pada penyempurnaan seluruh hasil pekerjaan sebelumnya (finishing) (Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Batusangkar Wilayah Kerja Provinsi Sumatera Barat, 2009)

Pada tahap ini juga disusun laporan kegiatan pemugaran sebagai bentuk dokumentasi administratif dan teknis pemeliharaan situs cagar budaya tersebut. Dengan selesainya Tahap II pemugaran ini, terlihat bahwa pemerintah tidak hanya memulihkan fisik bangunan, namun juga berupaya menjaga kesinambungan nilai sejarah dan arsitektur kolonialnya. Pelestarian ini menjadi bagian penting dalam menjaga Benteng Van der Capellen sebagai salah satu representasi sejarah kolonial di pedalaman Minangkabau.

Gambar 4. Kondisi benteng sebelum dan sesudah di pugar pada tahun 2009



Sumber : Laporan Pemugaran Benteng Van der Capellen Tahap II 2009

d) Pemugaran Tahap III Tahun 2010

Pada tahun 2010, pelaksanaan pemugaran Benteng Van der Capellen memasuki Tahap III. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari rekomendasi Tim Pemugaran Tahap II yang sebelumnya telah melakukan identifikasi bagian-bagian benteng yang belum tersentuh, khususnya pada sisi kiri bangunan. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk merekonstruksi kembali bentuk asli Benteng Van der Capellen guna mengembalikan citra arsitektural masa kolonialnya serta menjaga kesinambungan nilai-nilai sejarah dan kelestarian cagar budaya tersebut (Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Batusangkar Wilayah Kerja Provinsi Sumatera Barat, 2010).

Pemugaran Tahap III ini dilaksanakan berdasarkan alokasi anggaran dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Batusangkar Wilayah Kerja Provinsi Sumatera Barat dan Riau Tahun Anggaran 2010, dengan nomor 0085.0/040.04.0/III/2009 tertanggal 31 Desember 2009. Sebagai instansi teknis pelaksana, BP3 Batusangkar membentuk tim pemugaran yang bertanggung jawab atas perencanaan teknis hingga pelaksanaan fisik di lapangan yang dikoordinator Nedik Tri Nur Cahyo dan anggota tim nya Ramadhan Rusli, Afri Yonri, dan M.Yusuf (Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Batusangkar Wilayah Kerja Provinsi Sumatera Barat, 2010).

Tahapan teknis pemugaran dimulai dari pembongkaran dan pemasangan ulang atap yang telah lapuk, diikuti oleh perbaikan struktur bagian loteng dan balok yang mengalami kerusakan. Kemudian, dilanjutkan dengan pengecatan ulang terhadap elemen bangunan bagian dalam maupun luar, termasuk dinding dan jendela, serta penggantian tiang-tiang teras dan pemasangan kaca jendela yang disesuaikan dengan bentuk aslinya. Seluruh proses ini bertujuan memulihkan bentuk visual bangunan agar mendekati kondisi arsitektur awal masa kolonial. Tahap akhir dari pemugaran difokuskan pada penyempurnaan pekerjaan (*finishing*) dan penyusunan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif dan dokumentasi teknis. (Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Batusangkar Wilayah Kerja Provinsi Sumatera Barat, 2010)

Pelaksanaan Tahap III ini menjadi bagian dari kesinambungan program pelestarian Benteng Van der Capellen yang telah dimulai sejak tahun 2008. Lebih dari sekadar perbaikan

fisik, kegiatan ini mencerminkan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga warisan kolonial sebagai bagian dari perjalanan sejarah lokal di Tanah Datar. Pemugaran ini tidak hanya menegaskan komitmen negara dalam pelestarian, tetapi juga memberi ruang bagi bangunan bersejarah untuk kembali hadir sebagai sarana edukatif dan identitas budaya masyarakat setempat.

Pemanfaatan Benteng Van der Capellen

a) Sebagai Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga

Setelah melalui serangkaian tahapan pelestarian sejak tahun 2007 hingga 2010, Benteng Van der Capellen mulai difungsikan kembali oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Salah satu bentuk pemanfaatan yang dilakukan adalah menjadikan bangunan benteng sebagai kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Tanah Datar. Keputusan ini merupakan bentuk adaptasi fungsi bangunan cagar budaya agar tetap hidup dan tidak kembali terbengkalai, sesuai dengan semangat pelestarian yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga fungsional. Dalam hal ini, pemanfaatan dimaknai sebagai upaya pendayagunaan bangunan bersejarah dengan tetap mempertahankan nilai dan kelestariannya, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar

Budaya (Utami, 2017).

Pemanfaatan benteng sebagai kantor dinas merupakan bagian dari pendekatan pelestarian berkelanjutan (*sustainable conservation*), di mana bangunan bersejarah diberi peran baru dalam kehidupan sosial dan pemerintahan daerah. Dalam konteks ini, pelestarian tidak berhenti pada pemugaran, tetapi dilanjutkan melalui integrasi dalam sistem administrasi pemerintahan sebagai sarana pelayanan publik. Penggunaan ini sekaligus membuka peluang pengenalan nilai sejarah kolonial kepada masyarakat luas melalui kegiatan pemerintahan yang berlangsung di dalam bangunan bersejarah tersebut (Julia, 2018).

Bangunan sisi kiri benteng dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan administrasi dan pelayanan publik. Ruang-ruang yang sebelumnya merupakan barak tentara kolonial dirombak fungsinya menjadi ruang kerja modern bagi bidang-bidang utama dalam struktur organisasi dinas, seperti Bidang Olahraga, Bidang Kepemudaan, Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Ekraf), dan Bidang Pariwisata. Setiap bidang menempati ruang tersendiri yang kini difungsikan sebagai pusat pelayanan dan perencanaan program-program strategis berbasis kebudayaan dan kepemudaan.

Sementara itu, bangunan sisi kanan benteng difungsikan sebagai ruang pertunjukan seni dan ruang rapat dinas. Ruang pertunjukan ini menjadi wahana ekspresi budaya lokal yang digunakan untuk kegiatan kesenian tradisional, pelatihan komunitas, hingga penyelenggaraan event budaya yang mendukung pelestarian warisan tak benda Minangkabau. Ruang rapat yang berada di sisi yang sama difungsikan untuk mengakomodasi forum koordinasi lintas bidang dan menjadi pusat konsolidasi program-program berbasis budaya dan pariwisata. Sebagai pelengkap fasilitas publik, Pemerintah Daerah juga menyediakan mushalla dan toilet umum (WC) di dalam kompleks benteng. Keberadaan fasilitas ini memperkuat posisi Benteng Van der Capellen tidak hanya sebagai pusat administrasi pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata, tetapi juga sebagai ruang publik yang humanis dan inklusif, terbuka bagi masyarakat umum yang ingin mengakses layanan, menonton pertunjukan, atau sekadar mengenal sejarah lokal.

Gambar 5. Benteng Van der Capellen sebagai Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga



Sumber : Dokumentasi Pribadi 2025

a. Cagar Budaya

Pada tahun 2010, pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia menetapkan sebanyak 42 objek warisan budaya di Kabupaten Tanah Datar sebagai Cagar Budaya, termasuk di antaranya Benteng Van der Capellen. Penetapan ini merupakan bagian dari gelombang besar kebijakan pelestarian cagar budaya di Indonesia, yang dilatarbelakangi oleh meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap peninggalan masa lalu sebagai sumber identitas dan kebanggaan nasional (Kebudayaan, 2017).

Proses penetapan ini berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, khususnya pada Pasal 28 hingga Pasal 36 yang mengatur secara rinci mekanisme pendaftaran, pengkajian, dan penetapan suatu objek menjadi cagar budaya. Proses tersebut dimulai dari tahapan pendaftaran oleh pemerintah daerah, yang dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (sekarang Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah III Batusangkar). Setelah melalui tahapan administratif, bangunan tersebut dikaji oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) berdasarkan sejumlah kriteria, seperti usia bangunan, nilai penting sejarah, dan tingkat keaslian bentuk serta fungsi bangunan. Setelah dinyatakan memenuhi syarat sebagai bangunan yang memiliki nilai budaya tinggi dan layak dilestarikan, barulah penetapan resmi dilakukan oleh instansi yang berwenang. (Undang-Undang, 2010).

Dengan ditetapkannya Benteng Van der Capellen sebagai cagar budaya nasional, maka status hukumnya diperkuat dan menjadi tanggung jawab negara untuk dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan sesuai prinsip pelestarian yang berlaku. Penetapan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah konservasi bangunan kolonial di Kabupaten Tanah Datar, karena setelahnya bangunan ini tidak lagi hanya dipandang sebagai peninggalan fisik, tetapi juga sebagai warisan budaya yang memiliki makna penting bagi sejarah lokal dan nasional.

Gambar 6. Benteng Van der Capellen sebagai Cagar Budaya



Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2025

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelestarian Benteng Van der Capellen Tahun 2007-2010 merupakan inisiatif dari Balai Pelestarian Kebudayaan Batusangkar, Keterlibatan Balai Pelestarian Kebudayaan Batusangkar sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata berangkat dari tanggung jawab institusional dalam melindungi objek-objek bersejarah yang telah diidentifikasi memiliki nilai penting, meskipun belum memiliki status resmi sebagai cagar budaya nasional pada saat itu. Secara administratif, Benteng Van der Capellen baru ditetapkan sebagai Cagar Budaya pada tahun 2010, setelah melalui proses pendaftaran, kajian, dan verifikasi oleh Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Namun demikian, sebelum status tersebut disahkan, bangunan ini telah masuk dalam daftar usulan cagar budaya karena memiliki usia, nilai sejarah kolonial, dan keaslian bentuk. Benteng juga berada dalam kondisi kerusakan yang cukup parah pasca berhentinya fungsinya sebagai markas Polres Tanah Datar. Penyelamatan dan dalam rangka pelaksanaan mandat pelestarian warisan budaya yang lebih luas, Balai Pelestarian Kebudayaan Batusangkar mengambil alih tanggung jawab pelaksanaan pemugaran dengan dukungan anggaran dari pusat. Maka, dapat disimpulkan bahwa pemugaran Benteng Van der Capellen merupakan bentuk perlindungan dini terhadap bangunan yang memiliki nilai historis tinggi, dan langkah tersebut menjadi landasan penting dalam proses penetapan resminya sebagai Cagar Budaya nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip :

Kebudayaan, B. P. (2017). *Daftar Warisan Budaya dan cagar Budaya Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat*.

Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Batusangkar Wilayah Kerja Provinsi Sumatera Barat,

R. dan K. R. (2009). *Laporan Pemugaran Benteng Van der Capellen Tahap II Tahun 2009*.

Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Batusangkar Wilayah Kerja Provinsi Sumatera Barat,

R. dan K. R. (2010). *Laporan Pemugaran Benteng Van der Capellen Tahap III*.

Undang-Undang. (2010). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38552/uu-no-11-tahun-2010>

Utami, G. S. (2017). Modul Pelestarian Cagar Budaya. *Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan*. <http://www.unil.ch/spp/page34569.html>

Yusuf, M. (2007). *Laporan Pembersihan Lingkungan Benteng Van der Capellen*. Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Batusangkar.

Yusuf, M. (2008). *Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penugasan Benteng Van der Capellen*. Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Batusangkar.

Buku :

Gottschalk, L., & Notosusanto, N. (1975). *Mengerti sejarah: pengantar metode sejarah*. Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta. <https://books.google.co.id/books?id=SFWWswEACAAJ>

Herlina, N. (2020). Metode sejarah. In *Satya Historika* (Vol. 110, Issue 9). [http://digilib.isi.ac.id/6127/2/Pages from Metode Sejarah Revisi Akhir 2020.pdf](http://digilib.isi.ac.id/6127/2/Pages%20from%20Metode%20Sejarah%20Revisi%20Akhir%202020.pdf)

Najmi. (2019). Fort Van der Capellen : Benteng Sekaligus Ibukota Pertama Pemerintahan Minangkabau di pedalaman (Padangsche Bovenlanden). In S. Sugiharta (Ed.), *Historitas Cagar Budaya di Sumatera Barat* (I (Pertama, p. 37). Balai Pelestarian Cagar Budaya. Najmi. (2023). *“Sejarah Kota Batusangkar Dari Fort van der Capellen hingga Batusangkar 1822 – 1942.”* Rajawali Press.

Najmi. (2023). *“Sejarah Kota Batusangkar Dari Fort van der Capellen hingga Batusangkar 1822 – 1942.”* Rajawali Press.

Skripsi/Jurnal/ Laporan :

Aan, Fakultas Teknik Sipil Perencanaan Benteng Van der Capellen Menjadi Museum. (2024). *Laporan studio akhir arsitektur*.

Azaria, D. P. (2014). (2014). Sejarah Kelembagaan Kebudayaan Dalam Pemerintah Dalam Dinamikanya. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Vol.

- Barat, D. K. dan P. P. S. (2012). *Ragam Cagar Budaya Di Enam Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat*. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- Gottschalk, L., & Notosusanto, N. (1975). *Mengerti sejarah: pengantar metode sejarah*. Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
<https://books.google.co.id/books?id=SFWWswEACAAJ>
- Hadi, A. A., & Nofra, D. (2022). *1696-Article Text-6831-1-10-20221215*. November, 128–144.
- Herlina, N. (2020). Metode sejarah. In *Satya Historika* (Vol. 110, Issue 9).
[http://digilib.isi.ac.id/6127/2/Pages from Metode Sejarah Revisi Akhir 2020.pdf](http://digilib.isi.ac.id/6127/2/Pages%20from%20Metode%20Sejarah%20Revisi%20Akhir%202020.pdf)
- Julia, M. (2018). *Dokumentasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar, Batusangkat, 02 Maret 2018* 65 42. 65–70.